



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA MASYARAKAT

Vivi Friskila Angela

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Korespondensi penulis: vivifriskila@gmail.com

Abstract Regional libraries are often underutilized as sources of knowledge and reading materials by local communities. Data shows that people's level of interest in reading is still low. This can be seen from the low number of visits to the library, lack of participation in literacy activities, and lack of book ownership at home. In response to this, the Palangka Raya City Library and Archives Service has several policies to increase interest in reading. This article aims to look at the implementation and performance of policies regarding libraries in an effort to increase people's interest in reading in Palangka Raya City. Data was collected through interviews, documentation and observation, and qualitative analysis was carried out using a descriptive approach. The results of the research obtained show that there are several factors that make the implementation and performance of policies regarding libraries in Palangka Raya City run well, namely competent human resources in the library sector, satisfactory service, adequate facilities and infrastructure. Increasing people's interest in reading can have a positive impact on local development, such as improving the quality of education, increasing community competitiveness, and increasing awareness of social and cultural issues.

Keywords: policy implementation, library, reading interest

Abstrak Perpustakaan daerah seringkali kurang dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan dan bahan bacaan oleh masyarakat setempat. Data menunjukkan bahwa tingkat minat baca masyarakat masih rendah. Ini dapat dilihat dari rendahnya kunjungan ke perpustakaan, kurangnya partisipasi dalam kegiatan literasi, dan kurangnya kepemilikan buku di rumah. Menanggapi hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya memiliki beberapa kebijakan dalam meningkatkan minat baca. Artikel ini bertujuan untuk melihat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan dalam upaya peningkatan minat baca yang dimiliki masyarakat di Kota Palangka Raya. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, serta dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi dan kinerja kebijakan tentang perpustakaan di Kota Palangka Raya berjalan dengan baik yaitu SDM berkompeten dibidang perpustakaan, pelayanan yang memuaskan, sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai. Peningkatan minat baca masyarakat dapat memiliki dampak positif pada pembangunan lokal, seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan daya saing masyarakat, dan peningkatan kesadaran akan isu-isu sosial dan budaya.

Kata kunci: implementasi kebijakan, perpustakaan, minat baca

PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah tempat penyedia pengetahuan yang paling tepat untuk belajar, membaca, melakukan riset penelitian, dan juga mencari jawaban-jawaban dari setiap persoalan yang muncul, baik itu persoalan yang menyangkut pribadi manusia maupun persoalan yang berada di masyarakat, bangsa dan negara. Menurut UU No. 43 Tahun 2007 perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui berbagai cara interaksi pengetahuan. Menurut PERDA KOTA Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pada hakikatnya perpustakaan memiliki fungsi sebagai sumber informasi dalam seluruh bidang pengetahuan. Peran perpustakaan memiliki signifikansi besar dalam meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat. Pemanfaatan perpustakaan di Kota Palangka Raya masih kategori rendah, hal ini dilihat dari data kunjungan masyarakat. Adanya perubahan pola konsumsi media, terutama dengan maraknya penggunaan internet dan media sosial, dapat memengaruhi minat baca masyarakat. Minat baca seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal melibatkan aspek seperti bakat, kondisi kesehatan, jenis kelamin, dan kebiasaan individu. Di sisi lain, faktor eksternal mencakup pengaruh dari buku-buku yang tersedia dan kondisi lingkungan sekitar (Asniar dkk, 2020).

Di Kota Palangka Raya, perpustakaan memainkan peran penting sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan ilmu, pendidikan, dan informasi masyarakat melalui koleksi bukunya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebagai pelaksana kegiatan perpustakaan di Kota Palangka Raya, juga melaksanakan perpustakaan keliling untuk menyediakan bahan bacaan kepada masyarakat, termasuk di sekolah-sekolah dan tempat rekreasi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi pemerintah dalam memberikan informasi dan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mengusung inovasi dengan memperkenalkan Rumah Pustaka Peduli Arsip Masyarakat, di mana mereka memberikan pinjaman buku kepada setiap anggota keluarga di setiap rumah sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Menurut Darmono (2001), fungsi perpustakaan ada lima, yaitu (1) fungsi pendidikan, perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan, (2) fungsi penelitian, perpustakaan menyediakan berbagai jenis dan bentuk informasi untuk menunjang kegiatan penelitian, (3) fungsi informasi, perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai bahan ide atau ilmu lainnya, (4) fungsi budaya, Perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk kegiatan budaya dan seni, (5) fungsi rekreasi, perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya, antara lain untuk menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani.

Manfaat suatu kebijakan dapat dievaluasi melalui implementasinya. Proses implementasi menjadi elemen kunci dalam keseluruhan perencanaan kebijakan dan peraturan. Implementasi

kebijakan dianggap sebagai rangkaian kegiatan yang dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan. Spesifikasi ukuran dan tujuan kebijakan seharusnya dapat terlihat melalui peraturan yang digunakan, sehingga pada akhir program, dapat dievaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau program tersebut. Variabel ini merujuk pada dukungan sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan atau program, yang pada gilirannya diharapkan menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang optimal dan nilai yang efisien.

Kemudian komunikasi antar bidang dalam organisasi yang terdiri dalam 5 bidang. Diperlukan koordinasi juga komunikasi dari implementor suatu program dengan lembaga terkait, sehingga adanya kerja sama serta koordinasi antara lembaga yang berperan sangat diperlukan agar tercapainya keberhasilan dari program tersebut. karakteristik dari agen pelaksana kebijakan, ialah besarnya daya dukungan dari organisasi melingkupi struktur dari birokrasi, pola hubungan serta norma yang terjadi di dalam birokrasi, dimana keseluruhan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan.

Variabel selanjutnya adalah kondisi ekonomi, sosial, serta politik. Kondisi ini mencakupi sumber daya ekonomi serta lingkungan yang berpotensi memberikan dukungan dari keberhasilan pengimplementasian kebijakan, dalam artian seberapa jauh lingkungan dari kebijakan tersebut akan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Terakhir, sikap dari para pelaksana program atau kebijakan, yang mencakupi tiga poin penitng, pertama respon implementer terkait kebijakan, yang tentunya berpengaruh terhadap disposisi dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kognisi atau pengetahuan terkait program yang dilaksanakan, intensitas dari disposisi implementer, merupakan preferensi dari nilai yang dimiliki oleh implementer.

METODE

Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana bersifat deskriptif dalam memberikan gambaran secara mendalam (Sugiyono, 2017). Data yang diakumpulkan melalui wawancara serta dokumentasi dengan melakukan pertimbangan berupa untuk melakukan kajian, memahami serta melakukan analisis serta mendalami tentang implementasi kebijakan Perpustakaan Kota Palangka Raya. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan keakuratan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya sebagai agen pelaksana kebijakan perpustakaan di Kota Palangaka Raya sudah optimal mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik terutama dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kota Palangka Raya.

Menurut Bu Mega selaku pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya telah menjalankan layanan administrasi, layanan informasi, layanan penelitian, layanan rekreasi, layanan sirkulasi, layanan referensi, penelusuran literature, bimbingan pemakaian, analisis kepusatkaan dan statistik layanan. Hal ini sejalan dengan dengan perkembangan layanan dalam pengelolaan perpustakaan (Rahayuningsih, 2007).

Semenjak terjadinya Covid-19 para pengunjung pembaca Kota Palangka Raya menurun, tapi tidak sampai situ, pemerintah Kota Palangka Raya memunculkan kebijakan untuk menarik minat

baca masyarakat dengan membuat sebuah website. Kebijakan yang dikeluarkan dinas Kota Palangka Raya menghasilkan buah yang manis, para peminat baca terus meningkat dan kebijakan itu terjadi sampai sekarang, ujar Bu Mega selaku pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

Kebijakan yang dilakukan tidak hanya itu, salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah dengan melakukan kegiatan membuka stand di CAR FREE DAY. Kebijakan ini dilakukan dilakukan di akhir pekan yaitu dengan melakukan membaca keliling dengan membawa mobil yang berisikan buku-buku yang bermutu. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat Kota Palangka Raya. Perpustakaan dapat menumbuhkan minat baca masyarakat dengan cara memberikan berbagai pelayanan informasi yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan informasi yang siap pakai untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga mendorong sumber daya masyarakat agar terus tumbuh dan berkembang lebih maju (Rahmawati dkk, 2017). Kebijakan yang selanjutnya dilakukan Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palangka Raya adalah dengan cara melakukan sistem pinjam buku ke berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Kebijakan ini dilakukan dengan baik, kebijakan ini telah lama dilakukan oleh dinas perpustakaan daerah Palangka Raya.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran kesuksesan implementasi suatu kebijakan pertama-tama dievaluasi melalui prosesnya dengan meneliti bagaimana program dijalankan, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apakah tujuan program tercapai. Dalam implementasi program, seringkali terjadi multiinterpretasi, sehingga penting bagi suatu program atau kebijakan memiliki ukuran dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas dan dapat diukur. Hal ini memungkinkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau kegiatan pada akhir program. Informasi ini dapat ditemukan dalam dokumen turunan program, seperti peraturan dan pedoman program.

Standar nasional untuk perpustakaan, sebagaimana diatur dalam peraturan, dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan perpustakaan. Peraturan ini menjadi tolak ukur dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan, mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai panduan utama.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangatlah bergantung kepada kemampuan pemanfaatan sumber daya yang disediakan. bahwasanya ketersediaan sumberdaya yang memadai baik itu kualitas maupun kuantitas juga akan menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Sumber daya yang dimaksudkan ialah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, serta sarana prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia berkompeten yang dimiliki oleh DISPUSIP Kota Palangka Raya sudah lebih dari cukup, dilihat dari pelayanan sehingga para pembaca nyaman Ketika berkunjung. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DISPUSIP Kota Palangka Raya juga belum mencukupi. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya telah memiliki katalog bacaan di perpustakaan kota yang memadai. Memiliki mobil perpustakaan keliling yang beroperasi. Permasalahan mengenai lokasi perpustakaan kota sudah cukup strategis karena terletak di kawasan yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun permasalahan yang peneliti temukan adalah promosi terhadap perpustakaan kota ini tidak berjalan dengan baik mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Sikap Para Pelaksana Kebijakan

Sikap para pelaksana kebijakan diartikan. sebagai penerimaan atau penolakan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang terdiri atas respon dari implementer terkait kebijakan, kesadaran maupun pemahaman dari pelaksana terkait dengan kebijakan, serta intensitas dari disposisi implementor yaitu keberpihakan nilai yang dimiliki implementer. Dalam Implementasi dari Kebijakan tentang Perpustakaan di Kota Palangka Raya ini terdapat berbagai macam respon pelaksana terhadap program tersebut yang peneliti temukan.

Sikap para pelaksana sudah bagus dalam melaksanakan kebijakan perpustakaan ini, namun hal ini tentunya tidak terlepas dari faktor lain yang turut mempengaruhi sikap dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan ini.

Komunikasi Antar Organisasi

Hasil penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa tidak ada permasalahan serius terkait variabel komunikasi antar organisasi. Dikarenakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh satu lembaga sebagai organisasi pelaksana. Permasalahan yang muncul hanya terdapat pada komunikasi dengan sekolah yang menyediakan layanan perpustakaan, dimana komunikasi dengan beberapa sekolah penyedia perpustakaan masih belum berjalan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan secara langsung dengan terjun ke lapangan bahwasanya kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Palangka Raya dan Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan baik. Baik dari segi sumber daya, penerapan kebijakan, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi.

Dinas Perpustakaan Daerah Kota Palangka Raya meningkat secara terus menerus. Saat dilanda Covid-19 Pemerintah bertindak cepat dalam menangani masalah tersebut sehingga sampai sekarang peminat baca di perpustakaan daerah Kota Palangka Raya terus meningkat dengan berbagai program dan sarana prasarana yang disediakan.

Daftar Pustaka

- Angreani Ririt Prastika, Implementasi Kebijakan Literasi Sekolah Guna Peningkatan Karakter Gemar Membaca, Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development (IJSED) Vol. 1 Issue 2 Juli-Desember 2019.
- Asniar, La Ode Muharam, Dodi Priyatmo Silondae. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Baca Siswa. Jurnal Bening Vol. 4 No. 1 Januari 2020, Hal. 12
- Christine Diah Wahyuningsih, Implementasi Kebijakan Pengembang, Vol. 1 No. 1 (2020): Januari: Public Service And Governance Journal Perpustakaan Di Kabupaten Rembang Volno 1 (2020)
- Darmono, Manajemen Dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah. (Jakarta: Grasindo, 2001)
- Dewi Sartika Eden.
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN OLEH PEGAWAI PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT BACA Masyarakat jurnal MODERAT, Volume 4, Nomor 4, November 2018.
- Nihayati. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOLEKSIPERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI. Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol13, Nomor 1, 2021.
- PERDA KOTA Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 Ttg Penyelenggaraan Perpustakaan
- Rahayuningsih, Pengelolaan Perpustakaan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan